

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia adalah pembuangan sampah. Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, khususnya di Kota Semarang. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dimana lingkungan menjadi kotor dan sampah yang membusuk akan menjadi bibit penyakit di kemudian hari.

Sampah menjadi suatu permasalahan bagi masyarakat kota karena sangat berpotensi mengakibatkan turunnya produktivitas hingga akhirnya dapat menghambat suatu pembangunan ekonomi nasional. Sampah yang tidak ditangani secara serius dapat menumpuk seiring dengan laju urbanisasi yang terjadi di kota. Produksi sampah yang terus meningkat apabila tidak ada penanganannya akan mengakibatkan kerugian yang nyata. Misal, pembuangan sampah yang tidak diurus dengan ketat maka sampah akan menumpuk dengan cepat, bau akan mengganggu penduduk, serangga juga cepat berkembang biak dan penyakit akan merajalela yang berakibat pada terganggunya kesehatan penduduk. Sampah yang tidak terkelola dengan baik juga berpotensi mendatangkan bencana banjir karena tersumbatnya saluran-saluran air oleh sampah yang akan membawa kerugian yang lebih besar lagi.

Pemerintah Kota Semarang dinilai agak kewalahan dalam menyediakan TPA yang memadai bagi pembuangan sampah masyarakatnya. Pihak Pemerintah Kota sangat berkewajiban menyediakan sarana pengelolaan dan pembuangan sampah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5, yang berbunyi Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Undang-Undang.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, sudah seharusnya Pemerintahan Kota Semarang bertanggungjawab untuk mengelola sampah dengan serius. Terlebih lagi Pemerintah Kota Semarang juga sudah memiliki Peraturan Daerah tentang sampah, yaitu Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Amanah dari Undang-undang dan Peraturan Daerah di atas sangat tegas mengatur tentang bagaimana seharusnya Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Kota Semarang sebagaimana kota besar lain di Indonesia, jumlah penduduknya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2018 sebanyak 1.786.114 jiwa dan meningkat menjadi 1.814.110 jiwa pada tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan penduduknya sebesar 1,56% pertahun (BPS Kota Semarang 2019). Meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan

Jumlah timbunan sampah harian di Kota Semarang saat ini menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 1270 ton setiap harinya. Sementara jumlah sampah kelola di TPA Jatibarang pada periode 2017-2018 mencapai 850 ton setiap hari. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang agar jumlah sampah bisa ditekan. Disamping itu, urbanisasi dari tetangga Kabupaten dan Kota juga menyebabkan Kota Semarang memproduksi sampah dalam jumlah besar.

Dalam kenyataannya, pengolahan sampah dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti yang kita bayangkan. Ketidakikutan masyarakat dalam memelihara lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan itu menjadi kurang bersih dan kurang sehat. Demikian juga masyarakat yang ada di lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan perkotaan menjadi lingkungan yang kotor. Selain itu partisipasi masyarakat luas juga berperan serta dalam menjaga pelestarian lingkungan, karena hal ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Proses pembangunan di Kota Semarang semakin pesat seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan teknologi.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan, menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pembuangan sampah langsung ke selokan atau parit, merupakan salah satu bukti masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Karena pada dasarnya pengelolaan lingkungan tersebut, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab

masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat ini, diperlukan untuk meningkatkan perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*) dalam setiap proses kegiatan.

Walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan bila tidak dikelola dengan baik, tetapi ada sisi manfaatnya. Hal ini karena selain dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat, sampah juga dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat. Kemanfaatan sampah ini tidak terlepas dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menanganinya dan juga kesadaran dari masyarakat untuk mengelolanya.

Penataan lingkungan yang tidak baik dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak teratur berakibat timbulnya berbagai masalah seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Sedangkan penataan lingkungan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih, teratur dan bisa meningkatkan pelestarian lingkungan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan disekitarnya.

Penanganan masalah sampah khususnya di sepanjang daerah aliran sungai masih banyak mengalami kendala. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung ke badan air/sungai serta kurangnya kemauan masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkan dalam kegiatan industri dan rumah tangga mengakibatkan penurunan kualitas air sungai akibat masuknya beban pencemar baik sampah organik maupun non organik ke dalam air sungai. Kondisi tersebut juga terjadi di Kecamatan Genuk.

Disamping itu, melalui partisipasi mereka dalam setiap kegiatan, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keahlian pribadi, kepemimpinan dan pertanggungjawaban melalui proses “*learning by doing*”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Semarang maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Genuk Kota Semarang (Analisis Perda Nomor 6 Tahun 2012)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Genuk?
2. Apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Genuk?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Genuk.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Genuk.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Selain adanya tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang. Selain itu penelitian ini juga sebagai tambahan untuk bahan kajian dalam bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga dapat menambah wawasan dan pemahaman, khususnya tentang permasalahan sampah di Kota Semarang.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi untuk mengetahui cara pengelolaan sampah pada lingkungan.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengertian dan pemahaman tentang upaya-upaya yang dapat mendukung terintegrasinya pembuangan sampah rumah tangga.
3. Bagi peneliti, dapat dijadikan tinjauan kasus yang cukup menarik dalam menyumbangkan wacana keilmuan dengan konstruksi ilmiah dalam pengelolaan sampah.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Dalam bab ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk mempermudah peneliti dan juga memperkaya teori dalam pengkajian penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut juga dibutuhkan peneliti untuk melihat permasalahan mengenai permasalahan pengelolaan sampah dari beberapa sudut pandang penelitian yang berbeda, hal ini juga

berguna agar antara penelitian yang terdahulu tidak sama dan mempunyai perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

### **Penelitian Terdahulu**

- 1) Jurnal oleh La Ode Agus Said, Mardiyono dan Irwan Noor (2015) dari Universitas Brawijaya, Kota Malang, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau”

Hasil dari penelitian ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan tertuang dalam perda nomor 6 tahun 2009 tentang pengelolaan persampahan yang dijabarkan sebagai program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan oleh Dinas Kebersihan P3K Kota Baubau melalui bidang kebersihan sebagai pelaksana program adalah sebuah program yang lahir untuk menjawab persoalan persampahan dan mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan meningkatkan kebersihan kota dari pemukiman hingga pada ruang publik di kota Baubau. Dalam penjelasan implementasi kebijakan dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan untuk komunikasi yang dibangun oleh pihak dinas terkait khususnya para pelaksana program di dinas kebersihan belum terlaksana secara optimal, adapun ketersediaan sumber daya yakni sumber daya manusia sejauh ini masih terbatas yang menjadi kendala dalam pencapaian pelaksanaan program yang berpengaruh pada tercapainya program. Hanya saja untuk sarana dan

prasarana persampahan mendukung terlaksananya program yang dijalankan.

Terkait komitmen dan kemauan para pelaksana program khususnya di Dinas Kebersihan Kota Baubau bersama-sama mengawal untuk mensukseskan pelaksanaan program. Untuk pengelolaan persampahan yang dijabarkan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Baubau belum mempunyai standar yang jelas atau dengan kata lain dinas terkait belum merumuskan standart operating procedures (SOP), sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program. Hal ini dalam penanganan kebersihan cenderung menggunakan pendekatan persuasif yang sifatnya intruksi-intruksi kepada pelaksana program.

- 2) Jurnal oleh Novriza Yulida, Sarto Sarto, Agus Suwarni (2016) dari Universitas Gadjah Mada “Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah di Aliran Sungai Batang Bakarek-karek Kota Padang Panjang Sumatera Barat”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam hal membuang sampah di sungai. Subjek penelitian adalah kepala keluarga yang tinggal di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Bakarek- Karek sebanyak 118 orang. Variabel bebas penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, sarana dan implementasi kebijakan, sedangkan variabel terkait adalah perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Hasil yang didapat dari

penelitian adalah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku membuang sampah. Subjek dengan sikap baik memiliki perilaku baik 4,6 kali dibandingkan dengan yang mempunyai sikap kurang baik. Dengan demikian untuk mendapatkan sikap yang baik dan benar terhadap perilaku membuang sampah, perlu diberikan informasi atau penyuluhan secara rutin tentang pengelolaan sampah maupun bahaya sampah bagi kesehatan dan lingkungan. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah dan bahaya sampah, akan mewujudkan sikap yang baik terhadap pengelolaan sampah dan akan terbentuk perilaku yang tepat dalam melakukan pengelolaan sampah, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan terbebas dari pencemaran sampah.

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat hubungan yang bermakna pada implementasi kebijakan. Hal tersebut meningkatkan perilaku sebanyak 7,65 kali untuk membuang sampah kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di Kota Padang Panjang diharapkan dapat membantu dalam mengubah perilaku masyarakat sehingga daya dukung lingkungan dapat terus terjaga, sebab hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku manusia.

Adanya *reward* dan *pubishment* diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu program, misalnya dengan memberikan penghargaan atau hadiah bagi masyarakat yang telah

patuh pada kebijakan dan memberikan sanksi pada masyarakat yang melanggar kebijakan. Selain itu monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan juga diperlukan sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan selalu dipantau oleh pemerintah.

- 3) Jurnal oleh Achmad Norival (2018) dari Universitas Negeri Padang yang berjudul “Perilaku Masyarakat di Bagian Tengah Batang Ino Terhadap Sampah di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar”.

Perilaku masyarakat di bagian tengah Batang Ino terhadap sampah di Nagari Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar sebagian besar masih kurang baik hal ini dibuktikan dari sikap masyarakat yang tinggal dekat aliran Batang Ino pada umumnya membuang sampah ke Batang Ino, sampah dikumpulkan di dalam ember atau kantong plastik setelah itu dibuang ke Batang Ino, namun ada juga sebagian kecil dari mereka memilih untuk membakar sampah dibelakang rumah. Sampah di Batang Ino juga berasal dari warga luar Nagari Salimpaung yang dibuang pada malam hari dekat jembatan Batang Ino.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat membuang sampah ke Batang Ino adalah faktor internal, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, motivasi masyarakat untuk merubah perilaku membuang sampah ke Batang Ino, dan persepsi masyarakat untuk merubah perilaku membuang sampah ke

Batang Ino, dan persepsi masyarakat tentang fungsi sungai sebagai tempat untuk membuang sampah dan faktor eksternal yaitu aspek fisik berupa tersedia di Nagari Salimpaung.

### **1.5.1. Teori Partisipasi**

Partisipasi dapat diartikan dengan keikutsertaan atau keterlibatan baik secara fisik maupun non fisik dari seorang individu atau masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Santosa (1998:13) bahwa “Partisipasi didefinisikan sebagai karakteristik mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.”

Definisi tersebut menekankan bahwa partisipasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta lebih menekankan pada aspek psikologis yang mendorong seseorang atau individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat tiga unsur partisipasi, yaitu :

1. Adanya tanggung jawab.
2. Kesiediaan memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok.
3. Kesiediaan mereka terlibat di dalam kelompok.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka partisipasi seseorang sebaiknya didasarkan atas kesadaran sendiri, keyakinan serta kemauan, sebab hal itu akan bermanfaat bagi dirinya. Karena dirinya merasa tidak

dipaksakan sehingga dalam mengikuti kegiatan dapat dilaksanakan dengan sukarela.

Dari definisi tentang partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuangan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

#### **1.5.1.1. Tahap Partisipasi**

Tidak semua partisipasi ada atas kesadaran dan inisiatif warga masyarakat tetapi juga bisa merupakan mobilisasi dari atas untuk mencapai tujuan. Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979:51) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatankegiatan yang merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan, serta menyusun rencana kerjanya.
2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam program, inti dari keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikirn, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota.

3. Tahap pengawasan, proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program.

#### **1.5.1.2. Jenis-jenis Partisipasi**

Menurut Dwinigrum (2011) menjabarkan partisipasi menjadi empat jenis sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

### **1.5.1.3. Tingkat Partisipasi**

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat delapan tingkatan yang menunjukkan peningkatan dalam partisipasi masyarakat tersebut (Arnstein 1969 *dalam* Wicaksono 2010) yaitu :

1. Manipulasi (*Manipulation*)

Manipulasi merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah dan sebagai tangga pertama dari delapan anak tangga partisipasi. Pada tingkatan ini pemerintah membuat program pembangunan

kemudian membentuk komite (Badan Penasehat) untuk mendukung pemerintah. Dengan dibentuknya komite tersebut, pemerintah memanipulasi masyarakat sehingga munculnya anggapan bahwa program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya dijadikan kendaraan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak adanya peran serta masyarakat.

## 2. Terapi (*Therapy*)

Therapy merupakan tangga kedua. Pada tingkatan ini, terapi digunakan untuk merawat atau menyembuhkan penyakit masyarakat akibat adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin ataupun kesenjangan kekuasaan dan kesenjangan ras yang telah menjadi penyakit di masyarakat. Pada tingkat ini, pemerintah membuat berbagai program pemerintah yang hanya bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerless*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

## 3. Pemberitahuan (*Informing*)

Informing merupakan tangga ketiga. Tingkatan ini merupakan transisi antara *non participation* dengan *tokenism*. Pada tingkat ini terdapat 2 karakteristik yang bercampur, yaitu:

- a. Pemerintah memberi informasi mengenai hak, tanggung jawab, dan berbagai pilihan masyarakat, hal ini adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat.
- b. Pemberian informasi hanya bersifat komunikasi satu arah (dari pemerintah kepada masyarakat) berupa negosiasi terhadap rencana program yang akan dilakukan, tanpa adanya umpan balik (feedback) dari masyarakat sehingga kecil kemungkinan untuk mempengaruhi rencana program pembangunan tersebut. Media massa, poster, pamflet dan tanggapan atas pertanyaan, merupakan alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah

#### 4. Konsultasi (*Consultation*)

Konsultasi merupakan tangga keempat. Pada tingkatan ini pemerintah memberi informasi dan mengundang opini masyarakat. Tingkat ini merupakan tingkat yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (*artificial*) karena tidak dijadikannya ide-ide dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Bentuk konsultasi masyarakat adalah survei tentang pola pikir masyarakat,

pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat publik. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu.

5. Penentruman (*Placation*)

Penentruman merupakan tangga kelima. Pada tingkatan ini masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap program pemerintah, ini terbukti sudah adanya keterlibatan masyarakat yang ikut menjadi anggota komite (badan kerjasama) yang terdiri dari wakil-wakil dari instansi pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah membiarkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memberikan saran atau usul, tetapi keputusan masih dipegang oleh elit kekuasaan. Hal ini disebabkan jumlah masyarakat pada anggota komite masih terlalu sedikit dibandingkan dengan anggota instansi pemerintah.

6. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan merupakan tangga keenam. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Pemerintah membagi tanggung jawab dengan masyarakat terhadap perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan melalui badan kerjasama. Setelah ada kesepakatan tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.

7. Pelimpahan Kekuasaan (*Delegated Power*)

Pelimpahan kekuasaan merupakan tangga ketujuh. Pada tingkat ini, masyarakat diberi limpahan kekuasaan untuk membuat keputusan pada rencana atau program-program pembangunan yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan permasalahan yang ada, pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dibandingkan dengan memberi tekanan kepada masyarakat.

#### 8. Kontrol Masyarakat (*Citizen Control*)

Kontrol masyarakat merupakan tangga kedelapan dan merupakan tingkat partisipasi tertinggi. Pada tingkat ini, masyarakat mempunyai kekuatan penuh untuk mengukur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dibidang kebijaksanaan dan masyarakat dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui perantara pihak ketiga.

### **1.5.2. Teori Pengelolaan Sampah**

Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Pengelolaan sampah bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan.

Pengelolaan sampah pada saat ini semakin kompleks, oleh karenanya semakin banyaknya sampah yang dihasilkan, semakin beraneka ragam komposisinya, semakin berkembang kota, terbatasnya tersedia dan beberapa masalah lain yang berkaitan. Sebagai akibatnya, maka haruslah diketahui beberapa unsur utama dalam pengolahan sampah, sehingga kita mengetahui hubungan dari masing-masing unsur tersebut sehingga kita dapat memecahkan masalah sampah ini secara efektif dan efisien.

Pembangunan yang berkelanjutan dalam pengelolaan limbah padat mempunyai prinsip bahwa sampah tidak boleh terakumulasi di alam, sehingga pembuangan sampah harus dibatasi pada tingkat yang tidak melebihi daya dukung lingkungan untuk menghindari pencemaran. Pada prinsipnya pengelolaan persampahan bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan berkelanjutan seperti pada lingkungan:

1. Lingkungan pemukiman.
2. Sarana umum (terminal transportasi, pasar, rumah sakit, kantor pelayanan masyarakat, tempat hiburan dan lainnya).

3. Prasarana (jalan, sistem drainase, sungai, taman kota, instalasi kota lainnya).
4. Sarana pengelolaan kebersihan (Tempat Pembuangan Sementara/TPS, Tempat Pembuangan Akhir/TPA).

Menurut Kuncoro Sejati (2009:24) Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelohan, dan pembuangan akhir. Berikut adalah tahap tahap pengelolaan sampah :

1. Penimbulan sampah (*solid waste generated*)

Pada dasarnya, sampah itu tidak diproduksi, tetapi di timbulkan. Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatannya.

2. Penanganan di tempat (*on site handling*)

Adapun yang dimaksud dengan penanganan sampah di tempat atau pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di lokasi tempat pembuangan.

3. Pengumpulan (*collecting*)

Proses pengumpulan sampah dilakukan dari sumber sampah untuk ketempat penampungan sementara, atau ketempat

pengolahan sampah, atau langsung ketempat pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Pengumpulan ini merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ke TPS dengan menggunakan gerobak dorong atau mobil pick-up khusus sampah.

#### 4. Pengangkutan (*transfer/transport*)

Pengangkutan sampah pada umumnya menggunakan alat pengangkutan. Didaerah pemukiman, pengangkutan sampah umumnya menggunakan gerobak atau truck kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya menggunakan truck besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah antara lain: *truck, dump truck, compactor truck, multi loader, crane*, dan mobil penyapu jalan.

#### 5. Pengolahan (*treatment*)

Sampah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun) rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku didaerah tersebut. Teknik pemrosesan dan pengolahan sampah yang banyak dilakukan saat ini meliputi pemilihan sampah, baik secara manual maupun mekanis:

- a. Pematatan sampah.
- b. Pemotongan sampah.
- c. Pengomposan sampah.

- d. Pemrosesan sebagai sumber gas bio.
- e. Pembakaran dalam insinerator dengan pemanfaatan energi panas.
- f. Kegiatan daur ulang sampah.

#### 6. Pembuangan akhir

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah *Open Dumping*, yaitu sampah yang ada hanya ditempatkan begitu saja hingga kapasitasnya tidak lagi terpenuhi. Teknik ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Adapun teknik yang direkomendasikan adalah *sanitary landfill*, yaitu pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah.

### **1.5.3. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah**

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Begitu pula dengan sampah, dapat membuat hidup jadi tidak sehat. Karena itu sampah harus dapat diolah dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit. Dengan menumpuknya sampah dan menggunungnya sampah di TPA Jatibarang perlu diambil langkah-langkah yang efektif dalam menanggulangi masalah sampah tersebut.

Langkah pertama, faktor penyebab secara internal. Dilihat dari sudut pandang internal, faktor penyebab mencuatnya masalah sampah antara lain adalah minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah dilingkungan rumah tangganya sendiri. Banyak warga yang merasa bahwa dengan membayar retribusi sampah berarti tanggung jawab sampah menjadi tanggung jawab petugas kebersihan. Faktor internal lain adalah munculnya pola pikir / paradigma yang salah tentang sampah seperti :

- a. Masalah sampah adalah masalah kecil yang tidak perlu mendapat prioritas perhatian
- b. Sampah adalah barang yang tidak berguna, bukan sebagai sumber energi / pendapatan.
- c. Filosofi pengelolaan sampah : dikumpulkan → ditampung → dibuang ditempat akhir.

Faktor internal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya

adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan *end of pipe solution*, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Kedua, faktor penyebab secara eksternal. Faktor penyebab eksternal yang paling klasik terdengar adalah minimnya lahan TPA yang hingga saat ini memang menjadi kendala umum bagi kota-kota besar. Alasan eksternal lainnya yang kini santer terdengar di media massa adalah aksi penolakan keras dari warga sekitar TPA yang merasa sangat dirugikan dengan keberadaan TPA di wilayahnya. Faktor lain adalah tidak adanya AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) melalui kajian geologi, hidrogeologi, transportasi, sosial-ekonomi, dan lain-lain dimana dengan tidak adanya AMDAL membuat pemerintah tidak dapat memantau perkembangan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan. yang mendukung masalah AMDAL. Faktor eksternal dominan lainnya adalah pengelolaan sampah / kebersihan kota yang belum dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan perkotaan sehingga alokasi anggaran yang ada sama sekali kurang.

Salah satu kelemahan pengelolaan sampah di TPA adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan *end of pipe solution*, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Secara umum, pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah sampah seharusnya mempunyai rencana pengelolaan lingkungan hidup

yang baik bagi warga sekitar. Dimana dalam menyusun pengelolaan lingkungan ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan yaitu :

1. Siapa yang akan melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan apa yang harus dilakukan.
2. Sesuai dengan dampak yang diduga akan terjadi, maka akan ditetapkan cara pengelolaan yang bagaimana yang akan dilakukan atau teknologi apa yang akan digunakan agar hasilnya sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah
3. Karena berbagai institusi termasuk pemilik proyek yang akan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, maka teknologi yang akan digunakan tergantung pada kemampuan biaya yang akan dikeluarkan, terutama kemampuan dari pemilik proyek sebagai sumber pencemar.

Permasalahan umum yang terjadi pada pengelolaan sampah kota di TPA, khususnya kota-kota besar adalah adanya keterbatasan lahan, polusi, masalah sosial dan lain-lain. Karena itu pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan lahan yang terbatas dengan efektif
2. Memilih teknologi yang mudah, dan aman terhadap lingkungan

3. Memilih teknologi yang memberikan produk yang bisa dijual dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
4. Produk harus dapat terjual habis.

Dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif).

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

Untuk mempermudah analisis obyek penelitian melalui data yang telah diperoleh, maka konsep-konsep tersebut yang telah dikemukakan di atas perlu dioperasionalkan secara rinci dalam indikator-indikator sebagai berikut:

### **1.6.1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dalam hal ini partisipasi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Semarang yang memberikan pelimpahan kewenangan terhadap pemerinatah Kecamatan Genuk terkait dengan pengelolaan sampah berbasis

masyarakat di Kecamatan Genuk adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengelolaan sampah dengan cara ikut memilah sampah berdasarkan jenisnya. Konsep ini menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab semua masyarakat dan pemerintah, termasuk di sini adalah pengelolaan sampah.

Partisipasi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Genuk merupakan partisipasi bebas yang jenis keterlibatan dari masyarakat di dalamnya bersifat sukarela. Pemerintah hanya berupaya memaparkan keuntungan dan kerugian yang dapat dialami masyarakat bila terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong minat masyarakat untuk tertarik dan ikut terlibat dalam program pemerintah, tetapi tidak bersifat intimidatif.

### **1.6.2. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

Secara umum pengelolaan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kondisi eksiting pengelolaan persampahan mengacu pada pendekatan manajemen pengelolaan persampahan yang terdiri dari 5 aspek, yaitu: teknik operasional;

kelembagaan; pembiayaan dan retribusi; pengaturan/hukum; dan peran serta masyarakat.

Pengurangan sampah terdiri dari tiga aktivitas utama. Ketiga aktivitas tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R. Prinsip 3R tersebut, diantaranya: Pembatasan timbulan sampah (*reduce*); Pendaauran ulang sampah (*reuse*); Pemanfaatan kembali sampah (*recycle*).

Sementara kegiatan dalam penanganan sampah terbagi menjadi lima aktivitas utama, yakni: Pemilahan sampah; Pengumpulan sampah; Pengangkutan sampah; Pengolahan sampah; pemrosesan akhir sampah.

Pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum terdiri dari tiga kategori, yaitu pewadahan, pemilahan, dan pendaaurulangan. Konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat sendiri harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah menjadikan masyarakat agar memiliki daya untuk dapat mengelola sampah agar menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai jual. Seperti yang dikemukakan oleh Suharto (2009) dalam Libriyanti (2013) bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, dan agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Desain Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah di Kecamatan Genuk Kota Semarang (Analisis Perda Nomor 6 Tahun 2012)” adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif tidak akan terlepas dari keberadaan instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan. Wawancara, dokumentasi dan observasi adalah sebagian contoh instrumen penelitian kualitatif yang menjadi senjata menggali data dari sumber-sumber informasi.

Umumnya penelitian kualitatif deskriptif ini tujuan utamanya adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain. Maksud utamanya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkan lokasi penelitian agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Ketertarikan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Genuk Kota Semarang

karena di daerah ini sering terdapat musibah bencana banjir setiap tahunnya yang tidak lain penyebab utamanya adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

### **1.7.3. Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

### **1.7.4. Jenis Data**

Mengenai jenis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data hasil dari wawancara maupun data tertulis yang merupakan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan secara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur terlebih dahulu dipersiapkan instrumen yang berupa daftar pertanyaan yang berfungsi sebagai pedoman pada saat wawancara berlangsung, wawancara tersebut meliputi :

- 1) Strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

2) Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh melalui kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membawa dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang bersumber dari buku-buku, majalah dan koran-koran guna mendapatkan bahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini sehingga dapat membantu menganalisis dan membantu data primer. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen-dokumen mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sampah di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

#### **1.7.5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

- Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2004: 186). Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.

Dalam operasional penelitian ini maka pihak-pihak yang dijadikan responden penelitian adalah : Pengurus RT/RW, masyarakat pelaku, pejabat kecamatan. Informan tersebut didapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disusun sebagai instrumen untuk mendapatkan data penelitian.

- Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian yang dimana pengumpulan data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen guna melengkapi data yang sebelumnya agar mendapatkan sebuah data yang lengkap dan objektif.

- Observasi

Observasi dimaksudkan untuk melihat secara langsung fenomena empirik yang ada secara faktual mengenai objek dan subyek penelitian. Observasi dilakukan di lokasi penelitian, yaitu wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Observasi diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari mulai tempat, sarana prasarana, proses pemilahan melalui bank sampah sampai pengangkutan ke TPS, kegiatan pengelola sampah, situasi lingkungan dan rumah tangga warga, serta hal-hal lain yang relevan dengan ruang lingkup penelitian. Adapun instrumen yang digunakan sebagai pendukungnya adalah digital camera sebagai dokumentasi berbagai

hal yang terkait dengan masalah penelitian. Peneliti juga menggunakan alat tulis, seperti pena dan note book untuk mencatat hal-hal penting terkait hasil pengamatan.

#### **1.7.6. Analisis Data dan Interpretasi Data**

Upaya yang dilakukan dengan jalan-bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

Data analisis kualitatif yang sudah terkumpul dari studi kepustakaan akan dianalisa dan dikaji kemudian disistematikan menjadi analisis yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

Setelah data terkumpul dianalisis berdasarkan pada sumber aslinya, baru kemudian direduksi untuk disajikan dan ditarik kesimpulan. Pada tahap kesimpulan dimungkinkan untuk diverifikasi kembali kepada pengumpulan data semula. Dengan demikian, pada kesimpulan akhir benar-benar menyakinkan keabsahannya.

Proses analisis dimulai dari menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu, dari hasil wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Kegiatan menelaah data bertujuan untuk memahami semua data agar dapat ditata sesuai dengan permasalahannya dan disajikan dengan bahasa yang lebih baik dan tetap terjamin substansial dari data yang telah diteliti.

Proses kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan sementara sehingga masih perlu diverifikasi lagi pada tahap pengumpulan data. Langkah verifikasi ini dilakukan atau bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas. Pengumpulan data ulang memungkinkan untuk penyempurnaan hasil yang telah disimpulkan sementara. Perpaduan antara hasil kesimpulan sementara dengan hasil verifikasi untuk selanjutnya ditindak lanjuti pada kegiatan penetapan kesimpulan akhir.

#### **1.7.7. Kualitas Data**

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif (keadaan yang sebenarnya). Dengan demikian keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangatlah penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai dengan maksimal.

Untuk itu dilakukan triangulasi data dengan cara melakukan klarifikasi pada informan untuk menjaga validitas data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi data untuk kepentingan validitas data penelitian.